



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2017-2022

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

PROVINSI BANTEN



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017 – 2022 Pemerintah Provinsi Banten. Perubahan Renstra Dinas Kominfo ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, misi dan visi program prioritas pembangunan Provinsi Banten. Dengan tersusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/ prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Banten. Semoga Perubahan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi **"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah"**.

Serang,

2019

Kepala
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian Provinsi Banten

KOMARI, S.Pd, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650307 198902 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Landasan Hukum.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	1-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN	2-1
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	2-1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2-1
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	2-1
2.1.3 Uraian Tugas Satuan Organisasi.....	2-2
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	2-22
2.2.1 Sumber Daya manusia.....	2-22
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	2-25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	2-30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	2-33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN.....	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	3-1



	Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten.....	
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	3-5
3.3	Telaahan Renstra K/L.....	3-6
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	3-7
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3-8
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	4-1
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	4-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	5-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	6-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
BAB VIII	PENUTUP.....	8-1



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.2.1.1	Komposisi Status Kepegawaian.....2 - 22
2.2.1.2	Komposisi Jabatan PNS..... 2 - 22
2.2.1.3	Komposisi Eselon PNS..... 2 - 22
2.2.1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang..... 2 - 23
2.2.1.5	Komposisi Pendidikan PNS2 - 23
2.2.1.6	Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap.....2 - 23
2.2.1.7	Komposisi Umur PNS.....2 - 24
2.2.1.8	Data Pegawai Menurut Gender.....2 - 24
2.2.1.9	Pegawai Yang Diperbantukan.....2 - 24
2.2.2.1	Jumlah Aset.....2 - 25
2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....2 - 31
2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....2 - 32
3.1.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 3 - 1
3.1.2	Sistem Keamanan Informasi..... 3 - 2
3.1.3	Data Sektoral Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi3 - 3
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan..... 4 - 2
5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Renstra..... 5 - 2
6.1	Program Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan..... 6 - 6
6.2	Rencana program Kegiatan, dan Pendanaan..... 6 - 9
7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah7 - 2
7.2	Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....7 - 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	2 - 21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah) adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat tercapai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi



Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 s/d 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);



9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen Revisi Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;



- f. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi internal antar seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.

Tujuan penyusunan dokumen Revisi Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Tahun 2017-2022 adalah untuk menjabarkan visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Provinsi Banten.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu Strategis



BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Paragraf 12 Pasal 84 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten termasuk Dinas Tipe B untuk mewadahi urusannya dengan beban kerja yang sedang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi;
- e. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana telematika;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi;
 3. Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika.
- d. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 2. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik;
 3. Kepala Seksi kelembagaan dan Kemitraan Media.
- e. Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Tatakelola Persandian;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik;
 3. Kepala Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

2.1.3 URAIAN TUGAS

Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik, serta Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan e-Government;
- 6) Mengkoordinasikan implementasi e-Government dengan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- 7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi e-Government (Domain dan Sub Domain);
- 8) Menyusun kebijakan standarisasi pengembangan e-Government;
- 9) Merumuskan strategi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-Government;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelidiki pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala sub bagian program, evaluasi, pelaporan dan keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.



- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bersumber dari APBD maupun APBN;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;



- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang teknologi informasi dan komunikasi

- a. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika, Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Seksi Pendayagunaan Telematika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



- 5) Menyiapkan bahan teknis operasional teknologi informasi dan komunikasi jaringan Fiber Optik (FO);
- 6) Melaksanakan pelayanan teknis di bidang Akses Bandwith;
- 7) Melaksanakan Pelayanan Teknis Network Operation Center (NOC);
- 8) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- 9) Melaksanakan Pelayanan Jaringan Komunikasi;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi sarana dan prasarana telematika

- a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Telematika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- 5) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana telematika;
- 6) Melakukan pemeliharaan jaringan Fiber Optik dan jaringan Wireless;
- 7) Melakukan kegiatan teknis pendistribusian akses bandwidth;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi pengelolaan teknologi informasi

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melakukan kegiatan teknis *Network Operation Center (NOC)* dan pengawasan data center;
 - 6) Melakukan pengawasan dan pengendalian jaringan fiber optik dan wireless;
 - 7) Mendistribusikan kegiatan teknis pemberian password dan admin;



- 8) Melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur pusat sistem informasi Pemerintah Provinsi Banten;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur aplikasi pelayanan informasi lintas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan pengembangan, penataan dan evaluasi suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala provinsi;
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala provinsi;
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala provinsi;
- 14) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi/perizinan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi skala provinsi;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA

- a. Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pendayagunaan Telematika.



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pendayagunaan Telematika berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan Telematika;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Internet Sehat;
- 6) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber Crime*);
- 7) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008;
- 8) Melakukan kegiatan teknis pembentukan relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
- 9) Melakukan pengawasan dan pengendalian legal software;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan



koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika, Seksi Informasi dan Komunikasi Publik, serta Seksi kelembagaan dan Kemitraan Media.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang SIM (Sistem Informasi Manajemen), pengelolaan sistem web bantenprov.go.id;
- 6) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi integrasi data dan komunikasi publik;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian banten cyber;
- 8) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP);
- 9) Menyelenggarakan koordinasi dengan bahan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
- 10) Merencanakan pelaksanaan pengembangan diseminasi informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama (PPID Utama);
- 11) Merencanakan pelaksanaan kemitraan media;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan



sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi pengembangan aplikasi informatika

- a. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melakukan kegiatan teknis pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka e-government;
 - 6) Melakukan kegiatan teknis pengembangan aplikasi web;
 - 7) Melakukan kegiatan teknis pengintegrasian data dalam kerangka Banten cyber;
 - 8) Melaksanakan penerapan dan pengembangan aplikasi informatika;
 - 9) Melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan aplikasi informatika;



- 10) Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia;
- 11) Melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan aplikasi informatika kepada perangkat daerah dan publik;
- 12) Melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi informatika secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik;
- 13) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi informasi dan komunikasi publik

- a. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Informasi dan Komunikasi Publik.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melakukan kegiatan teknis penyebarluasan informasi melalui media luar ruang (billboard, baleho dan videotron);
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Informasi dan Komunikasi Publik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 7) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi kelembagaan dan kemitraan media

- a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melakukan kegiatan teknis Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID);
 - 6) Melakukan kegiatan teknis Komisi Informasi Publik (KIP);
 - 7) Melakukan kemitraan media (media cetak, media elektronik dan online);



- 8) Melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa informasi, pemingkatan badan publik dan hari hak untuk tahu tingkat provinsi;
- 9) Melaksanakan kegiatan Penyiaran pemantauan isi siaran TV dan Radio;
- 10) Melaksanakan kegiatan P3SPS dan Literasi Media;
- 11) Melaksanakan kegiatan Rekomendasi izin siaran radio dan televisi;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala bidang persandian statistik dan layanan pengadaan

- a. Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tatakelola Persandian, Seksi Pelayanan Informasi Statistik, serta Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan secara berkala sesuai dengan



peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 5) Merencanakan kegiatan teknis *kriptografi* (persandian);
- 6) Merencanakan kegiatan teknis Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi pelayanan informasi statistik

- a. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Informasi Statistik.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Statistik berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Informasi Statistik;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- 5) Melakukan kegiatan teknis pengumpulan, pengelolaan data dan informasi;
- 6) Melakukan kegiatan teknis diseminasi informasi dan statistik;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi tatakelola persandian

- a. Kepala Seksi Tatakelola Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Tatakelola Persandian.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Tatakelola Persandian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Tatakelola Persandian berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Tatakelola Persandian;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan kegiatan teknis pengamanan data dan informasi;
 - 6) Melaksanakan kegiatan teknis enkripsi data dan kriptografi (persandian);



- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi layanan pengadaan barang dan elektronik

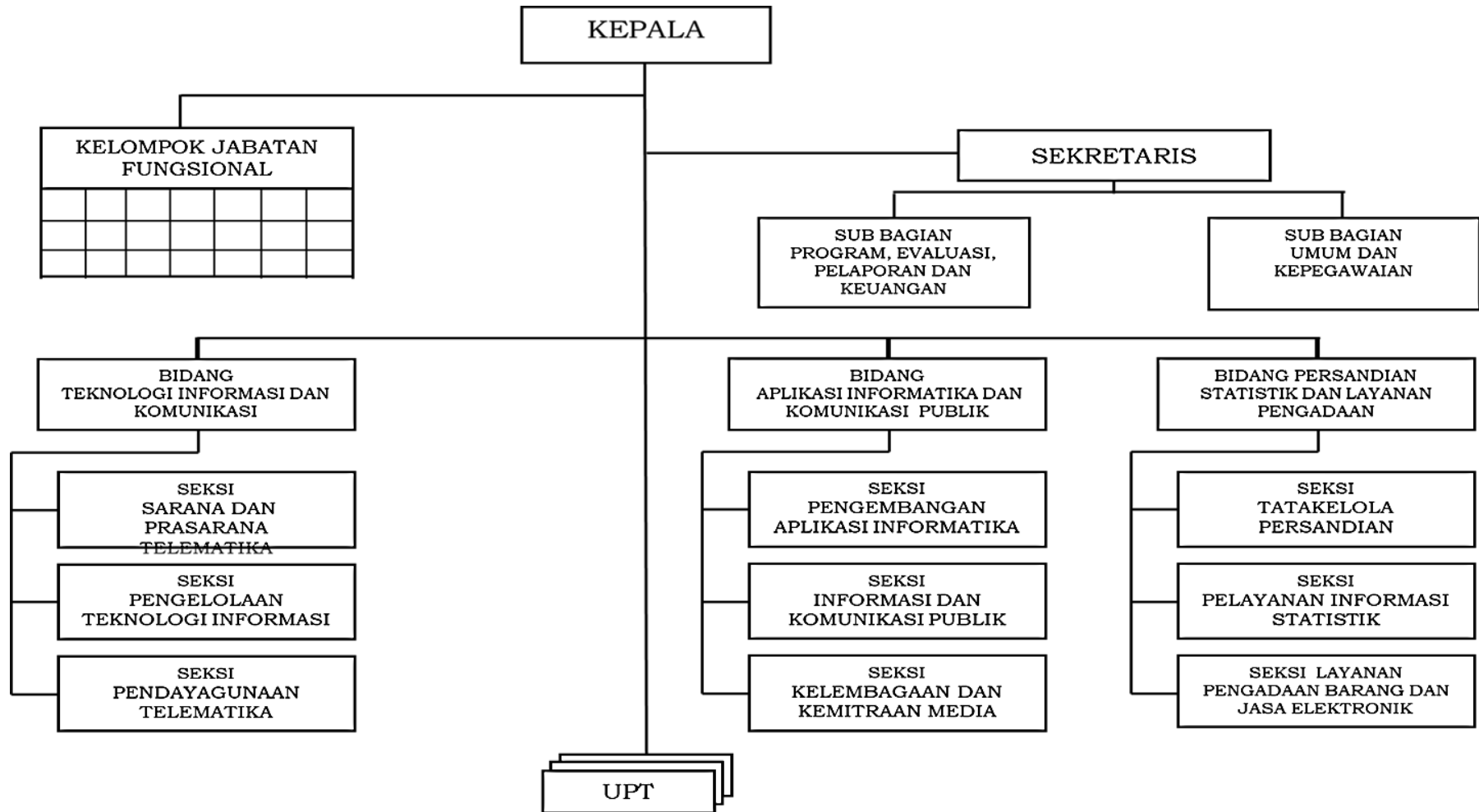
- a. Kepala Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melakukan kegiatan teknis pendokumentasian seluruh kegiatan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa elektronik;
 - 6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronikdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 7) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik sesuai dengan prosedur dan



-
- peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Gambar 2.1 STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN





2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebanyak 166 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Komposisi Status Kepegawaian :

Tabel 2.2.1.1 Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	60	36.15
2	CPNS	4	2.40
3	Honorer	102	61.45
	Jumlah	166	100.00

b. Komposisi Jabatan PNS

Tabel 2.2.1.2 Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	16	25.00
2	Jabatan Fungsional Umum	48	75.00
	Jumlah	64	100.00

c. Komposisi Eselon PNS :

Tabel 2.2.1.3 Komposisi Eselon PNS

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1	1.56
2	Eselon III.a	4	6.25
3	Eselon IV.a	11	17.19
4	Staf	48	75.00
	Jumlah	64	100.00



d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2017

Tabel 2.2.1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					PNS	HONORER	GRAND TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML			
1	Kepala Dinas																			√	1	1		1
2	Sekretariat						√	√	√		7	√	√	√	√	10	√	√			2	20	40	60
3	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								√		1	√		√	√	8	√	√			3	12	8	20
4	Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik						√		√		3	√	√	√		12	√				3	18	29	46
5	Bidang Persandian Statistik dan Pelayanan Pengadaan						√				1	√	√	√		10	√	√			2	13	25	48
9	Fungsional																							
	Jumlah																					64	102	166

e. Komposisi Pendidikan PNS :

Tabel 2.2.1.5 Komposisi Pendidikan PNS

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	8	12.50
4	D III	7	10.94
5	S 1	33	51.56
6	S2	16	25.00
	Jumlah	64	100

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

Tabel 2.2.1.6 Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	60	58.83
2	D III	2	1,96



3	S 1	37	36.27
4	S 2	3	2.94
	Jumlah	102	100,00

g. Komposisi Umur PNS :

Tabel 2.2.1.7 Komposisi Umur PNS

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	1	1.56
2	25 – 30 th	2	3.12
3	31 – 40 th	14	21.88
4	41 – 50 th	39	60.94
5	51 – 55 th	8	12.50
6	> 56 th	-	-
	Jumlah	64	100.00

h. Data pegawai menurut Gender :

Tabel 2.2.1.8 Data Pegawai Menurut Gender

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	122	73.49
2	Perempuan	44	26.51
	Jumlah	166	100.00

i. Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang diperbantukan :

Tabel 2.2.1.9 Pegawai yang Dperbantuan

No.	Instansi	Jumlah
1	Komisi Informasi Provinsi Banten	5
2	KPID	5
	Jumlah	10



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung berbentuk asset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten terdiri dari sarana kantor dan sarana Informasi layanan dengan perincian dapat dilihat pada table berikut

TABEL 2.2.2.1 JUMLAH ASSET DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

No	Nama Barang	Keterangan
1	AC	12 Unit
2	AC Sentral	1 Unit
3	AC Split	46 Unit
4	AC Unit	12 Unit
5	Alat Pendingin Lain-lain	2 Unit
6	Adaptor	9 Unit
7	Alat kantor lainnya	2 Buah
8	Alat kantor lainnya (Proyektor)	1 unit
9	Alat komunikasi lain-lain	5 Buah
10	Alat komunikasi sosial lainnya	1 Buah
11	Alat pemadam kebakaran	6 Buah
12	Alat penghancur kertas	8 Buah
13	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 Buah
14	Amplifier	1 Unit
15	Aset renovasi (Command center, partisi, ruang sekretariat, perpustakaan, ruang staf TIK)	3 Paket
16	Band kas	3 Buah
17	Bangunan menara TV	1 Paket
18	Bangunan tempat pertemuan	1 Paket
19	Bangunan gedung kantor lain-lain (tiang baliho/tipe knock down, tiang baliho 4 x 6	6 paket
20	Buku umum lain-lain	124 buah
21	Camera Attachment	16 Unit
22	Camera Electronik	6 Unit



23	Camera Film	4 Unit
24	Camera Photo Micrograph	1 Unit
25	Camera Video	8 Unit
26	Camera View Finder	16 Unit
27	Control Panel	4 Unit
28	Dispenser	9 Buah
29	Exchause Fan	1 Unit
30	External	8 Buah
31	Facsimile	4 Unit
32	Filling Besi	51 Buah
33	Filling Kayu	1 Buah
34	Global Positioning System	3 Unit
35	Handy Cam	6 Unit
36	Handy Talky	8 Unit
37	Hardisk	108 Buah
38	Hub	11 Buah
39	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 paket
40	Jaringan Transmisi Lain-lain	391 Paket
41	Kendaraan Bermotor lain-lain	1 Unit
42	Key Board	12 Buah
43	Kitchen Set	1 Paket
44	Kompor Gas	2 Buah
45	Kontrol Elektronik	10 Unit
46	Kursi Besi	9 Buah
47	Kursi hadap papan meja kerja	12 Buah
48	Kursi pegawai non struktural	134 Buah
49	Kursi kerja pejabat eselon III	2 Buah
50	Kursi kerja pejabat eselon IV	6 Buah
51	Kursi kerja pejabat eselon V	10 Buah
52	Kursi kerja pejabat lain-lain	32 Buah



53	Kursi lipat	20 Unit
54	Kursi rapat	2 Unit
55	Kursi tamu	3 Set
56	Kursi tamu di ruangan pejabat	3 Set
57	Laptop	25 Unit
58	Lemari Arsip Dinasmis	26 Unit
59	Lemari Besi	15 Unit
60	Lemari ES	7 Unit
61	Lemari Kaca	24 Unit
62	Lemari Sorok	1 Unit
63	Lensa Kamera	2 Unit
64	Load Speaker	3 Unit
65	Main frame/PC Rakitan	1 Unit
66	Meja Biro	60 Unit
67	Meja kerja	1 Unit
68	Meja kerja pegawai non struktural	40 Unit
69	Meja kerja pejabat Eselon III	1 Unit
70	Meja kerja pejabat Eselon IV	14 Unit
71	Meja kerja pejabat lain-lain	2 Unit
72	Meja komputer	4 Unit
73	Meja rapat	16 Unit
74	Meja Reseption	1 Unit
75	Mesin Copy	3 Unit
76	Mesin ketik elektronik	2 Unit
77	Mesin ketik manual	2 Unit
78	Penghisap debu	1 Unit
79	Mesin Penghitung uang	1 Unit
80	Minibus	12 Unit
81	Modem	8 Unit
82	Monitor	27 Unit



83	Note book	23 Unit
84	Offair TV Monitor	4 Unit
85	Overhead Proyektor	2 Unit
86	Personal Computer lain-lain	1 Unit
87	Personal Computer Unit	85 Unit
88	Personal Computer frame lain-lain	2 Unit
89	Papan nama instansi	4 Buah
90	Papan panel	1 Buah
91	Papan pengumuman	1 Unit
92	Peralatan antena SHF/Parabola (Juniper Reuter)	1 Unit
93	Peralatan antena UHF Lain-lain	81 Unit
94	Peralatan Jaringan Lain-lain	928 Unit
95	Peralatan komupter main frame	15 Unit
96	Peralatan mini komputer lain-lain	14 Unit
97	Peralatan Personal Computer lain-lain	89 Unit
98	Peralatan studio visual lain-lain	3 Unit
99	Personal Computer	17 Unit
100	Personal Computer lain-lain	41 Unit
101	Pesawat telephone	1 Unit
102	Power Supply	1 Unit
103	Printer	72 Unit
104	Proyektor / Atachment	7 Unit
105	Rak besi	4 Unit
106	Rak peralatan	1 Unit
107	Remote Control Unit	2 Unit
108	Reuter	13 Unit
109	Scaner	5 Unit
110	Sedan	1 Unit
111	Sepeda motor	10 Unit



112	Server	66 Unit
113	Sofa	5 Unit
114	Software Count Off – line computer	7 Unit
115	Sound system	1 Unit
116	Stabilizer	10 Unit
117	Switcher combination	31 Unit
118	Switcher antena lain-lain	2 Unit
119	System/Power Suply lain-lain	1 Unit
120	Tablet machine	2 Unit
121	Tabung gas	2 Buah
122	Tanah bangunan penjaga menara	1 Blok
123	Tangga aluminium	2 Buah
124	Tape recorder	1 Unit
125	Tas kulit	10 Unit
126	Telephone (PABX)	10 Unit
127	Telephone mobile	3 Unit
128	Televisi	18 Unit
129	Tripod	1 Unit
130	Tripod Camera	1 Unit
131	TV Monitor	4 Unit
132	Unintemuptible Power Suply	52 Unit
133	Unit Pemancar UHF Transportable	1 Unit
134	Video monitor	3 Unit
135	Video effect	1 Unit
136	Whiteboard	6 Unit
137	Wireless	70 Unit
138	Amplifier	1 Unit



2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2012 – 2017

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Secara umum kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika selama periode 2012-2016 sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan kepada lembaga penyiaran di lingkup provinsi banten.
- b. Melakukan monitoring pengawasan siaran lembaga penyiaran se provinsi Banten.
- c. Melakukan pemantauan dan pengendalian amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk, serta spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
- d. Melaksanakan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, informasi aplikasi lingkup pemerintahan provinsi banten.
- e. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi lintas sektor berbasis elektronik serta penyelenggaraan sistem informasi manajemen Daerah (SIMDA)
- f. Memfasilitasi Komisi Informasi.
- g. Melakukan pemantauan dan pengendalian telekomunikasi khusus dan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi, galian penggelaran kabel telekomunikasi lintas kab/kota.
- h. Menyusun pedoman pengaturan standarisasi pengelolaan dan pelayanan bidang telekomunikasi, telematika sarana telekomunikasi, desiminasi informasi dan informasi publik.

Tabel berikut ini, menyajikan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode 2012-2016 dengan membandingkan target dan capaian kinerja.



Tabel

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017.				6.20	55.79	68.42	85.26	86.84	-	49.49	68.42	83.52	33.33	-	88.71	100	97.96	38.38
	Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)				20	30	40	60	75	19.75	19.16	40	60	75	100	100	100	100	100
	Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)				20	30	40	60	75	19.14	17.81	40	60	75	100	100	100	100	100
	Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Tabel

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA LANGSUNG	21.651.517.000	27.276.758.850	21.651.517.000	27.276.758.850	40.976.956.153	17.672.072.973	24.788.395.788	17.672.072.973	24.788.395.788	36.373.395.158	81,62	90,88	81,62	90,88	88,77		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam dua tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, namun jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan yang masih dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statististik dan Persandian Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Persaingan global;
- b) SKPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama;
- c) Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- d) Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan;
- e) Kurangnya Komitmen Pimpinan SKPD Prov. Banten, SKPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;
- f) *Content* digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat;
- g) Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;
- h) Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
- i) Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI;
- j) Keterbatasan anggaran.

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Kemajuan teknologi informasi;
- b) Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi;
- c) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemkominfo RI);



-
- d) Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat;
 - e) Media massa yang sangat berkembang;
 - f) Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;
 - g) Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain: keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi melalui pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat untuk meminimalisir kesenjangan tersebut.

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

URUSAN	PERMASALAHAN	PENANGGUNG JAWAB
Komunikasi dan Informatika		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



Peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)		Kepala Dinas	
	Masih kurangnya Ketersediaan Perangkat Teknologi Informasi		Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik
Statistik dan Persandian		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten	
Indeks Keterbukaan informasi Publik		Kepala Dinas	
Belum meningkatnya dukungan Layanan Persandian			
	Belum optimalnya Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik		Kabid Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
	Belum Optimalnya pemanfaatan Data pembangunan Daerah dan Integrasi data Daerah		
	Belum Optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi		

Sumber : RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

**Tabel 3.1.2 SISTEM KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

No	Keamanan	Produk Keamanan	Keterangan
1	Firewall	Fortigate	Fortigate sebagai perangkat yang menjamin keamanan jaringan secara keseluruhan sekaligus berfungsi sebagai gateway dan router
2	VPN (Virtual Private Network)	Pritunl	VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi dengan enkripsi
3	Git Analyzer	Blackfire	Aplikasi untuk mencari celah pada coding di suatu program



Tabel 3.1.3 DATA SEKTORAL
BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN

No	Jenis Data/Barang	Jumlah	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jaringan FO	13.000 Meter	Area KP3B	-	-	-	-	13.000 Meter	-
2	Jaringan Wireless	292 Unit	Area KP3B	-	-	-	292 Unit	-	-
3	BTS (Base Transceiver Station) milik Diskominfo	3 Unit	Gunung Karang Kab. Pandeglang, Gunung Kencana Kab. Lebak, Diskominfo (KP3B)	3 Unit	-	-	-	-	-
4	BTS Umum (Base Transceiver Station)	4000 unit		-	-	-	-	-	4000 unit
5	Data Center	3 Unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia, Batam Techno Park Jl. Tanjung Bemban Citra Lautan Teduh No. 18 Batu Besar	3 Unit	-	-	-	-	-
6	Server	25 Unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia	-	1 unit	11 unit	-	-	-
7	NOC (Network Operations Center)	1 Ruangan	Diskominfo	-	-	1 unit	-	-	-
8	Command Center	3 Ruangan	Diskominfo, Ruang Rapat Gubernur (Setda Provinsi Banten), Ruang Rapat Wagub (Setda Provinsi Banten)	-	-	-	-	-	3 ruangan
9	Access Point	372 Unit	Access Point Ruang Rapat untuk di Lingkungan OPD Provinsi Banten	-	45	50	55	150	72
10	Firewall	7 unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia	-	1 unit	-	3 Unit	1 Unit	2 Unit
11	Wireless Indoor	30 Unit	Area KP3B	-	-	-	20 Unit	-	10 unit
12	Switch	100 Unit	Area KP3B	-	-	-	4 unit	-	4 unit
13	NAS (Network Area Storage)	1 Unit	Data Center	-	-	-	-	-	1 Unit



14	CCTV	18 Unit	Pertigaan Setda, Gerbang 2 (Depan DPRD), Bunderan Depan Kominfo, Bunderan Depan PTSP, Gerbang 1 (Depan Setda), Depan BKKBN, Pakupatan, Gerbang 3 (Kemenag), Perempatan Boru, Patung, Alun-alun Serang, Gedung BPKAD, Gedung PUPR, Gedung PTSP, Gedung DPRD, Gedung DINDIK	-	3	-	1 unit	7	7
15	Bandwith	1.300 MBPS	OPD Luar dan Dalam KP3B, Banten Lama, Musium Banten, RSUD Banten, Komisi Informasi dan CCTV	-	-	-	-	-	1.300 MBPS
16	Nama Domain Resmi Pemerintah Prov. Banten	1 Domain	Diskominfo	-	-	-	-	1 Domain	-
		63 Sub Domain		-	-	-	-	63 Sub Domain	-
17	Email	4.884 Email	Diskominfo	-	-	-	-	4.884 Email	-
18	Personal Komputer Lainnya	12 Unit	Diskominfo						12 Unit
19	PC Unit	23 Unit	Diskominfo						23 unit
20	Router	2 Unit	Diskominfo			2 unit	1 unit		2 unit
21	Peralatan computer Lainnya Dimencion	263 unit	Diskominfo		-	-	-	-	263 unit
22	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti	91 unit	Diskominfo	-		-	-	-	91 unit
23	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti 16 port rg	91 unit	Diskominfo	-		-	-	-	91 unit
24	Peralatan jaringan Lainnya Tiang oktagonal	5 unit	Diskominfo	-		-	-	-	5 unit
25	Peralatan jaringan Lainnya ciscosuitch	4 Unit	Diskominfo	-		-	-	-	4 Unit
26	Peralatan jaringan Lainnya enciosure	4 Unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	4 Unit
27	Penyimpanan Website	43 Hosting	Diskominfo	-	-	-	-	43 Hosting	-



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 adalah:

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA,
DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah **Misi Pertama Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good governance)**, dengan tujuan Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan **Misi Kedua Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur** dengan tujuan Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik;
4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Pemerintahan dengan **Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**
2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a) Urusan Komunikasi dan Informatika dengan program :
 1. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik.



2. Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - b) Urusan Statistik dengan **Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.**
 - c) Urusan Persandian dengan **Program Tata Kelola Persandian.**

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015 – 2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015 – 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika



sebagai pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015 – 2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Banten telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Banten.



Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Banten selama 3 tahun yang akan datang (2020 - 2022) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Banten.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2017-2022 antara lain :

1. Implementasi e-Government

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang



disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Pada Tahun 2017-2022 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja tiap tahunnya. Adapun Tujuan dari RPJMD 2017-2022 yaitu :

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.
2. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pada RPJMD 2017- 2022, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 melalui pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2017– 2022 yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.



Sedangkan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi.
3. Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik.
4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	60	70	75	80	85	85
		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan %)	20	42.10	61.83	0	0	0
			Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (Satuan %)	0	0	0	100	100	100
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan : Nilai)	88,08	88,08	89.00	89.55	90.00	90.00
		Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Data Base Statistik Sektoral (Satuan : Nilai)	0	0	0	100	100	100



Misi : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Satuan : Nilai)	0	2.60	3.00	3.60	3.90	4.00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Strategi pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
2. Meningkatkan Aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika;
3. Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektoral Secara Elektronik;
4. Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika.

Untuk mewujudkan misi ke 1 (Satu) RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 "***Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)***" dan Misi ke 2 (Dua) "***Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur***" maka dilakukan berlandaskan 4 (Empat) Strategi pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional;
2. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi;
3. Menyajikan layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral;
4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam rangka mengembangkan muatan SPBE dan kualitas pelayanan publik.



Dari ke empat strategi pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 dan ke empat strategi perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan.

Arah Kebijakan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan;
2. Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi;
3. Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektoral;
4. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi.

Arah Kebijakan pada Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional;
2. Meningkatkan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi;
3. Meningkatkan Keakuratan Data Sektoral;
4. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana TIK.

Tabel 5 Visi Misi, Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik da Persandian Provinsi Banten

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
MISI : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance				
1	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM	Meningkatkan kualitas pelayanan dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana



	Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik		professional	yang memadai dan SDM professional
		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	Meningkatkan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi
		Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Menyajikan layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral	Meningkatkan Keakuratan Data Sektoral
MISI : 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur				
2	Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam rangka mengembangkan muatan SPBE dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana TIK



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2017 -2022 merencanakan 5 Program/ Bidang Urusan yaitu :

- 1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.**
- 2. Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.**
- 3. Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Publik.**
- 4. Program Tata Kelola Persandian.**
- 5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.**

Dari 5 program tersebut di atas mencakup 18 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

A. Bidang Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

Indikator Kinerja :

1. Capaian Nilai IKM (Satuan Nilai);
2. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah;
3. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah;
4. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;
5. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

Pada Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 5 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

- 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan;
- 2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP);
- 3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak.

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan;
2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan;
3. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian;
4. Penyusunan Renstra;
5. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral OPD.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian;
2. Peningkatan Kompetensi Aparatur.

4. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

1. Pengelolaan Perpustakaan Internal;
2. Pengelolaan Kearsipan Dinamis.

5. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
4. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENDAYAGUNAAN, PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja :

1. Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan %);

2. Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
4. Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan.

Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki 6 Kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

- a. Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- b. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya SPSE.

2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi terpadu;
- b. Pemeliharaan Jaringan TIK.

3. Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK

- a. Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK;
- b. Pengawasan dan Pengendalian Legal Software;
- c. Pembangunan Sinergitas Dengan Relawan TIK.

4. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Penyusunan Standar norma pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur TIK;
- b. Pengelolaan, pemanfaatan Infrastruktur TIK;
- c. Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi.

5. Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Layanan Aduan Aplikasi dan Layanan manajemen data Informasi elektronik Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
- c. Tersusunnya Standar norma dan kriteria penyelenggaraan SPBE.

6. Pembangunan, Integrasi dan Interprobabilitas

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi;



- b. Integrasi layanan publik dan pemerintahan.

3. PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

A. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja :

1. Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik memiliki 5 Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

- a. Penyediaan Informasi Publik;
- b. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

2. Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik

- a. Hubungan Kemitraan di Bidang Komunikasi dengan berbagai lembaga;
- b. Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Publik.

3. Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Komunikasi Publik

- a. Pengumpulan Data dan Monitoring Analisa Berita, Aspirasi dan Opini Publik;
- b. Pembentukan Opini dan Komunikasi Krisis;
- c. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan Akun Media Sosial Pemprov Banten.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

- a. Fasilitasi Komisi Informasi

5. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik

- a. Penyebarluasan Informasi Pimpinan Daerah di Berbagai Media

4. PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

a. Bidang Urusan Statistik

Indikator Program :

1. Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
2. Ketersediaan Database Sektoral.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 1 Kegiatan sebagai berikut :



1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral
 - a. Pengelolaan data dan informasi Sistem Informasi Banten Satu Data;
 - b. Pelayanan dan Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral.

5. PROGRAM TATA KELOLA PERSANDIAN

a. Bidang Urusan Persandian

Indikator Program :

1. Cakupan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi;
2. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi.

Program Tata Kelola Persandian memiliki 1 Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi.
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. Pengelolaan Persandian;
 - c. Pengelolaan Keamanan Informasi.



Tabel 6.1
Program Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Tepat waktu
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas
			Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang kompeten
2	Program Pengembangan, Pemanfaatan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan sesuai standar
			Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK	Terseleenggaranya pengawasan, pengendalian dan pendayagunaan pemanfaatan TIK sesuai dengan perundang undangan TIK
			Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	terkelolanya infrastruktur TIK yang yang berkualitas



		Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan aturan
			Pembangunan, Integrasi dan Interpropabilitas	Terbangunnya dan terintegrasinya Aplikasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten secara efektif dan berdayaguna
		Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Jasa Elektronik sesuai standar layanan
3	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang berkualitas
			Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
			Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan standar layanan Informasi Publik
			Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	Terkelolanya Aspirasi dan Opini Publik terhadap pemerintah yang positif
			Kemitraan Komunikasi Publik	terjalinnnya Hubungan kemitraan yang baik di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga
4	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Database Sektoral	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Sektoral yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan
5	Program Tata Kelola Persandian	Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Terkelolanya Persandian dan Keamanan Informasi yang handal



Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2017-2022, Terlampir dalam tabel 6.2.



PROVINSI BANTEN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER : 121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	3 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1210.01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	2.5 Skala	2,80		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	
					2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter)/(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun) x 100 %
					3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			(Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran)/(Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia) x 100 %
					4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			(Jml Aparatur yang mendapat sertifikat pada tahun n)/(Jml Aparatur yang mengikuti pelatihan pada tahun n) x 100 %
					5 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			(Jumlah Laporan yang sesuai SAP)/(Jumlah dokumen laporan) x 100 %
			1210.121001.00.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dokumen	8,00	10.000.000,00	8,00	30.000.000,00	8,00	35.000.000,00	8,00	35.000.000,00	8,00	145.000.000,00		Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) yang tepat waktu		
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah Dokumen Laporan Pajak		
			1210.121001.00.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 Dokumen	3,00	75.000.000,00	3,00	377.253.700,00	3,00	450.000.000,00	3,00	500.000.000,00	3,00	500.000.000,00	3,00	1.902.253.700,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Tepat waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi Program Kegiatan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	9,00		9,00		11,00		10,00		10,00		10,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD	
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	4,00		4,00		6,00		6,00		6,00		6,00		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian yang tepat waktu	
					4 Penyusunan Renstra	1 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		1,00		1,00		Jumlah Dokumen Renstra yang sesuai dengan RPJMD	
					5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral OPD	0 Dokumen	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		4,00		Jumlah Dokumen Data Informasi Sektoral OPD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1210.121001.00.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 Paket	1,00	621.526.000,00	1,00	601.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.223.476.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					2 Belanja Pengadaan Alat Elektronik	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Pengadaan Komputer, Personal Komputer, Peralatan Personal Komputer	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pengadaan Alat Perengkapan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			1210.121001.00.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12,00	600.000.000,00	12,00	810.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.410.800.000,00		
					1 Listrik	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Inventaris Kantor/APK	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1210.121001.00.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12,00	2.862.812.200,00	12,00	3.406.794.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6.269.606.500,00		
					1 Operasional Kantor Tidak Tetap	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Makan dan Minum Kantor	12 Dokumen	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Operasional Jasa Kantor/Sewa Gedung	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					9 Pelaksanaan Hut Banten dan Banten Expo	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			1210.121001.00.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Fasilitas Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	59,00	128.699.800,00	19,00	43.000.000,00	15,00	50.000.000,00	15,00	50.000.000,00	15,00	50.000.000,00	15,00	321.699.800,00	Tercapainya Peningkatan Kapasitas	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	0 Dokumen	3,00		5,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Aparatur yang kompeten	Jumlah Dokumen Kompetensi Aparatur
			1210.121001.00.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 Bulan	12,00	720.000.000,00	12,00	245.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	965.080.000,00		
					1 Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi Ke Dalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1210.121001.00.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	1 Buku Koleksi	0 Judul	75,00	22.500.000,00	30,00	30.000.000,00	0,00	45.100.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	105,00	157.600.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Internal
					2 Rak Buku	0 Unit	2,00		1,00		0,00		0,00		0,00		3,00			
					3 Pengelolaan Perpustakaan Internal	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					4 Pengelolaan Kearsipan Dinamis	0 Bulan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		12,00			Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan Dinamis
			1210.121001.00.01.010	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.082.670.000,00	1,00	5.833.090.000,00	1,00	5.833.090.000,00	1,00	16.748.850.000,00	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
					2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
					4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	1 Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten 2 Persentase Sarana dan Prasarana Persandian 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1210.16	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	1 Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10 %	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	(Jumlah pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan)/(capaian pengelolaan komunikasi dan informasi)x 100
			1210.121001.00.16.001	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	0 Terinformasikannya ke publik proses dan hasil pembanguana	100 %	100,00	16.728.896.900,00	100,00	9.744.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.473.644.900,00		
					1 Peningkatan Kapasitas Aparatur PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	50 Orang	200,00		200,00		0,00		0,00		0,00		450,00			
					2 Penerbitan Tabloid Menara Banten dan e-mag Menara Banten	12 Materi	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Informasi Pembangunan pada Media Luar Ruang	9 Materi	36,00		36,00		0,00		0,00		0,00		81,00			
					4 Informasi Pembangunan pada Media Cetak	76 Materi	60,00		55,00		0,00		0,00		0,00		191,00			
					5 Informasi Pembangunan pada Media Televisi	13 Materi	46,00		46,00		0,00		0,00		0,00		105,00			
					6 Informasi Pembangunan Melalui Media Radio	6 Materi	46,00		46,00		0,00		0,00		0,00		98,00			
					7 Informasi Pembangunan pada Media Online	18 Materi	30,00		40,00		0,00		0,00		0,00		88,00			
					8 informasi Pembangunan pada Media Sosial	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					9 Materi Informasi Pembangunan	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					10 Materi Informasi Publik	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					11 Konten Website Pemerintah Provinsi Banten (bantenprov.go.id)	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					12 Operasional PPID Utama	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1210.121001.00.16.002	Komunikasi kelembagaan dan kemitraan media	0 Meningkatkan Peran Kelembagaan dan Kemitraan Media	100 %	100,00	2.150.839.500,00	100,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.550.839.500,00		
					1 Operasional Komisi Informasi Provinsi Banten	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 FGD Stakeholder Pembangunan dengan Media Massa	0 Kegiatan	4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					3 Kemitraan dengan awak media massa	0 Kegiatan	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
					4 Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Berbagai Media	0 Kegiatan	4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					5 Kerjasama kemitraan dengan ormas, lembaga profesi dan lembaga media untuk literasi masyarakat	1 Kegiatan	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		3,00			
					6 Pengelolaan Opini Publik	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1210.121001.00.16.003	Pelayanan Informasi Publik	1 Penyediaan Informasi Publik	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	546.000.000,00	328,00	600.000.000,00	328,00	600.000.000,00	984,00	1.746.000.000,00	Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang berkualitas	jumlah Dokumen Informasi Publik sesuai dengan Klasifikasi Informasi Publik
					2 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		36,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
			1210.121001.00.16.005	Kemitraan Komunikasi Publik	1 Hubungan kemitraan di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	700.000.000,00	9,00	1.150.000.000,00	9,00	1.150.000.000,00	27,00	3.000.000.000,00	terjalinya Hubungan kemitraan yang baik di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga	Jumlah Kegiatan Hubungan kemitraan di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga
					2 Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Publik	0 Kegiatan	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Publik	
			1210.121001.00.16.006	Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	1 Pengumpulan Data dan Monitoring Analisa Berita, Aspirasi dan Opini Public	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	608.000.000,00	12,00	1.000.000.000,00	12,00	1.020.000.000,00	12,00	2.628.000.000,00	Terkelolanya Aspirasi dan Opini Publik terhadap pemerintah yang positif	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data dan Monitoring Analisa Berita, Aspirasi dan Opini Public
					2 Pembentukan Opini dan komunikasi krisis	0 Bulan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		12,00		Jumlah Kegiatan Pengembangan Opini dan komunikasi krisis	
					3 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan akun Media Sosial Pemprov Banten	0 Bulan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		12,00		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan akun Media Sosial Pemprov Banten	
			1210.121001.00.16.007	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1 Fasilitasi KI	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.000.000.000,00	12,00	2.300.000.000,00	12,00	2.300.000.000,00	12,00	6.600.000.000,00	terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan standar layanan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi
			1210.121001.00.16.008	Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik	1 Penyebarluasan Informasi Pimpinan Daerah di Berbagai Media	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	7.808.000.000,00	12,00	8.620.540.000,00	12,00	8.600.540.000,00	12,00	25.029.080.000,00	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pimpinan Daerah di Berbagai Media
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	1 Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten 2 Persentase Sarana dan Prasarana Persandian 3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1215.15	Program Tata Kelola Persandian	1 Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi	0 %	0,00		0,00		60,00		80,00		100,00		100,00	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	(Jumlah Aplikasi di OPD yang memenuhi Standar Keamanan)/(Jumlah Aplikasi yang Ada)x 100	
					2 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi	10 %	20,00		40,00		0,00		0,00		0,00		40,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1215.121001.00.15.001	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	1 Operasional Persandian dan keamanan informasi dan Pemeliharaan Alat Sandi, Alat Keamanan Informasi dan Alat Sarana Informasi	12 Dokumen	12,00	539.460.000,00	12,00	1.017.192.000,00	0,00	852.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	24,00	3.608.652.000,00	Terkelolanya Persandian dan Keamanan Informasi yang handal	jumlah Dokumen Operasional Persandian dan keamanan informasi dan Pemeliharaan Alat Sandi, Alat Keamanan Informasi dan Alat Sarana Informasi
					2 Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten	2 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Jumlah Dokumen Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten	
					3 Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi pada Aplikasi	12 Dokumen	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		24,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi pada Aplikasi	
					4 Pembinaan Pengelolaan Keamanan informasi instansi Pemerintahan oleh SDM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-Provinsi Banten	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Keamanan informasi instansi Pemerintahan oleh SDM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-Provinsi Banten	
					5 Sosialisasi tentang "IT Security Assistent" di lingkungan Organisasi Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Jumlah Dokumen Sosialisasi tentang "IT Security Assistent" di lingkungan Organisasi Pemerintah Provinsi	
					6 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persandian dan Keamanan Informasi	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persandian dan Kemnanaan Informasi	
					7 Pengelolaan Persandian	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Persandian	
					8 Pengelolaan Keamanan Informasi	0 Dokumen	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		12,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keamnanan Informasi	
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	1 Maturitas Data Base Statistik Sektoral	1214.01	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	30 %	50,00		60,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral	
					2 Ketersediaan Database Sektoral	0 %	0,00		0,00		50,00		75,00		100,00		100,00		(Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan)/(Jumlah Data Statistik Sektoral yang Ada)x 100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1214.121001.00.01.001	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	0 Terkelolanya Data Statistik Sektoral	100 %	100,00	366.591.000,00	100,00	804.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.170.991.000,00		
					1 Pengumpulan Data dan Informasi Kab/Kota	0 Kegiatan	4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					2 Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Diseminasi Informasi Statistik	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Pengembangan Metode Penyajian Data Statistik	0 Kegiatan	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
					6 Pelayanan Informasi Statistik Provinsi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	0 Keg	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					9 Pengelolaan PPID Pembantu	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					10 Survey Kepuasan Masyarakat	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					11 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	0 Dokumen	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
			1214.121001.00.01.011	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	1 Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	800.000.000,00	12,00	836.580.000,00	12,00	836.580.000,00	12,00	2.473.160.000,00	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Sektoral yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data
					2 Pelayanan dan Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral	0 Bulan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		12,00		Jumlah Pelaksanaan Pelayanan dan Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral Selama 1 Tahun	
Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1210.15	Program Pengembangan, Peningkatan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Persentase ketersediaan perangkat TI	12.41 %	30,26		48,38		0,00		0,00		0,00		48,38		Meningkatnya Sarana dan Prasarana TIK yang Memadai dan Berkualitas	
					2 Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	12.41 %	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00			(Jumlah perangkat teknologi informasi yang mendukung Pencapaian SPBE)/(Jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada)x 100
					3 Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	12.41 %	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00			(Jumlah Pengelolaan Sarpras Aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks SPBE)/(Pengelolaan Aplikasi yang ada)x 100
					4 Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan	0 Jumlah	0,00		9,00		12,00		13,00		17,00		17,00			Jumlah Standar Layanan LPSE yang di capai
			1210.121001.00.15.001	Pengembangan Sarana dan prasarana telematika	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Telematika	100 %	100,00	8.673.666.500,00	100,00	9.290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.963.666.500,00		
					1 Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi	500 Mbps	1.150,00		1.150,00		0,00		0,00		0,00		2.850,00			
					2 Sarana dan Prasarana penunjang Sistem Informasi Terpadu	20 Unit	10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					3 Bangunan Banten Command Center - Meeting Room	1 Unit	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					4 Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Pemeliharaan Jaringan Wireless	21 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Pengelolaan Inventarisasi Peralatan TIK	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			

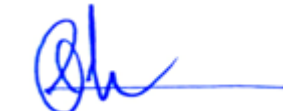
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1210.121001.00.15.002	Pendayagunaan Telematika	0 Meningkatkan Pengelolaan Pendayagunaan SDM TIK	100 %	100,00	188.940.000,00	100,00	398.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	587.250.000,00		
					1 Sosialisasi Antisipasi Kejahatan Dunia Maya dan Internet Sehat di Provinsi Banten	800 Orang	800,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		2.600,00			
					2 Bimbingan Teknis Konten Website Terpadu	100 Orang	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		300,00			
					3 Pembangunan Sinergitas dengan Relawan TIK	0 Kegiatan	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pengawasan dan Pengendalian Legal Software	0 Kegiatan	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					5 Sosialisasi Regulasi Perundang-undangan di Bidang TIK	100 Orang	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		300,00			
			1210.121001.00.15.003	Pengelolaan Teknologi Informasi	0 Terkelolanya Teknologi Informasi	100 %	100,00	1.622.290.000,00	100,00	1.794.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.416.562.000,00		
					1 SOP Suprastruktur Egov,Infrastruktur Jaringan,Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi	4 Dokumen	11,00		13,00		0,00		0,00		0,00		28,00			
					2 Pengelolaan Data Center dan NOC	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Pengelolaan Command Center	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Wireles	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TI pada PD	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penglolaan Infrastruktur Aplikasi Pelayanan Informasi Lintas Perangkat Daerah (service delivery chanel web, email, telephone/mobile phone, sms gateway)	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Penataan dan Evaluasi Suprastruktur Egov,Infrastruktur Jaringan, Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi	0 Dokumen	4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					8 Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					9 Pengelolaan Domain Banten Prov.go.id	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1210.121001.00.15.004	Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika	0 Terintegrasi dan Terbangunnya Aplikasi	100 %	100,00	1.673.668.100,00	100,00	2.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.323.668.100,00		
					1 Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi	1120 Orang	300,00		300,00		0,00		0,00		0,00		1.720,00			
					2 Pembangunan Sistem Informasi	6 Aplikasi	11,00		13,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					3 Pengembangan Sistem Informasi	1 Aplikasi	14,00		7,00		0,00		0,00		0,00		22,00			
					4 Integrasi Sistem Informasi	1 Dokumen	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		11,00			
					5 Pengembangan Website OPD	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Pengelolaan Aplikasi Banten Satu Data	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Sosialisasi Aplikasi	0 Aplikasi	11,00		13,00		0,00		0,00		0,00		24,00			
					8 Layanan Aduan Aplikasi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					9 Maintenance Website terpadu bantenprov.go.id	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1210.121001.00.15.008	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	1 Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur se-Provinsi Banten	2 Dokumen	2,00	577.500.000,00	2,00	946.200.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	6,00	4.223.700.000,00	terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Jasa Elektronik sesuai standar layanan	Jumlah Dokumen Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur se-Provinsi Banten
					2 Rapat Koordinasi LPSE Se-Provinsi Banten	1 Dokumen	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Jumlah Dokumen Rakor LPSE Se-Provinsi Banten yang dilaksanakan	
					3 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	12 Dokumen	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	
					4 Bimtek SPSE bagi Penyedia Barang/Jasa	2 Dokumen	2,00		4,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Jumlah Dokumen Bimtek SPSE bagi Penyedia Barang/Jasa	
					5 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya SPSE	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		4,00		4,00		10,00		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya SPSE	
			1210.121001.00.15.011	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi terpadu	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	9.583.590.000,00	100,00	9.250.000.000,00	100,00	9.250.000.000,00	310,00	28.083.590.000,00	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi terpadu yang tersedia
					2 Pemeliharaan Jaringan TIK	0 Unit	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		15,00		Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang di Pelihara	
			1210.121001.00.15.012	Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK	1 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya TIK	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	284.840.000,00	14,00	295.000.000,00	14,00	295.000.000,00	42,00	874.840.000,00	Terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan pendayagunaan pemanfaatan TIK sesuai dengan perundang undangan TIK	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya TIK
					2 Pengawasan dan Pengendalian Legal Software	0 Kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Legal Software di pemerintah Provinsi Banten	
					3 Pembangunan Sinergitas Dengan Relawan TIK	0 Kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sinergitas Dengan Relawan TIK	
			1210.121001.00.15.013	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Penyusunan Standar norma pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur TIK	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.500.000.000,00	4,00	1.750.000.000,00	1,00	1.750.000.000,00	16,00	5.000.000.000,00	terkelolanya infrastruktur TIK yang berkualitas	Jumlah Dokumen Standar norma pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur TIK yang di susun
					2 Pengelolaan, pemanfaatan Infrastruktur TIK	0 Dokumen	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		12,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan pemanfaatan Infrastruktur TIK	
					3 Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1210.121001.00.15.014	Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Layanan Aduan Aplikasi dan Layanan manajemen data Informasi elektronik Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.400.000.000,00	12,00	2.400.000.000,00	12,00	2.400.000.000,00	12,00	7.200.000.000,00	Terlaksananya Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen layanan Aduan Aplikasi dan Layanan manajemen data Informasi elektronik Pemerintah Daerah
					2 Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		jumlah Dokumen Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	
					3 Tersusunnya Standar norma dan kriteria penyelenggaraan SPBE	0 Dokumen	0,00		0,00		4,00		4,00		8,00		16,00		Jumlah Dokumen Standar norma dan kriteria penyelenggaraan SPBE yang dibuat	
			1210.121001.00.15.015	Pembangunan, Integrasi dan Interprobabilitas	1 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi	0 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.300.000.000,00	8,00	1.086.940.000,00	8,00	1.086.940.000,00	24,00	3.473.880.000,00	terbangunnya dan terintegrasinya Aplikasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten secara efektif dan berdayaguna	Jumlah Aplikasi yang di Bangun dan di kembangkan
					2 Integrasi layanan publik dan pemerintahan	0 Aplikasi	0,00		0,00		5,00		6,00		6,00		17,00		Jumlah Aplikasi yang di integrasikan	

SERANG

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan



Komari, S.Pd, MM



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam 5 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebarluasan informasi.

Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan suatu pemerintah daerah akan dituntut juga penggunaan TIK dalam kegiatan pada masing-masing OPD.

Sejalan dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang secara rinci mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti tabel dibawah ini.:



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan OPD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.1	Fokus Administrasi Pemerintahan								
1.1.1	Administrasi Pemerintahan								
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
2	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1210	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	%	20,00	42,10	61,83	0,00	0,00	0,00	61,83
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	0,00	2,60	3,00	3,6	3,9	4,00	4,00
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88,08	89,00	89,55	90,00	90,00	90,00
12.14	Statistik								
1	Maturitas Data Base Statistik Sektoral	Nilai	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
12.15	Persandian								
1	Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100



Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Tata Kelola Pemerintahan								
1.1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	2,50	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi								
2.1	Persentase ketersediaan perangkat TI	%	12.41	30.26	48.38	0.00	0.00	0.00	48.38



2.2	Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	12.41	30.26	48.38	67.31	85.08	100.00	100.00
2.3	Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	12.41	30.26	48.38	67.31	85.08	100.00	100.00
2.4	Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan	Jumlah	0.00	0.00	9.00	12.00	13.00	17.00	17.00
3	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik								
3.1	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
4	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian								
4.1	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	%	30.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
4.2	Ketersediaan Database Sektoral	%	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	100.00	100,00
5	Program Tata Kelola Persandian								
5.1	Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi	%	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	100.00	100.00
5.2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi	%	10.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00



Pada indikator sasaran menunjukkan persentase kenaikan pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarkan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Definisi operasional IKU Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, disesuaikan dengan dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sebagaimana terlampir.



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Perubahan Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagai apapun isi dari Perubahan Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh- sungguh dari seluruh aparatur Dinas untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan beretika.



LAMPIRAN

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.	
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Periode Renstra SKPD					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang efektif dan terarah,terukur dan tepat waktu		Dokumen	17	16	75.000.000	17	377.253.700	22	450.000.000	21	500.000.000	22	500.000.000	98	500.000.000				
							Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program Kegiatan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi Program Kegiatan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan	Dokumen	3	3		3		3		3		3		15					
							Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan sesuai dengan perencanaan daerah dan pusat	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan yang tepat waktu dan sesuai dengan RPJMD	Dokumen	9	9		9		11		10		10		49					
							Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pengendalian yang tepat waktu	-Dok. Laporan Bulanan (12 Dok); Dok. Laporan Triwulan (4 Dok);-Dok. TEPPRA (1 Dok);-Dok. Realisasi Barang/Jasa (1 Dok);-Dok. Semesteran dan Tahunan Kegiatan PD (12 Dok);-Dok. SAKIP (12 Dok)	Dokumen	4	4		4		4		4		4		20					
							Sub Kegiatan : Penyusunan Renstra	Tersusunnya Dokumen Renstra sesuai dengan RPJMD	Dokumen Renstra	Dokumen	1			1					1			2					
							Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Tersedianya data dan Informasi Pembangunan dan terintegrasi	-dokumen data sektoral OPD (4 Dok)	Dokumen						4		4		4		12					
							Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor		Paket	1	1	621.526.000	1	601.950.000	1		1		1		1				Kasubag Umum dan Kepegawain	
							Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	sarana dan prasarana kantor	Paket	1	1		1								1					
							Sub Kegiatan : Belanja Pengadaan Alat Elektronik	Tersedianya Pengadaan Alat Elektronik	Alat Elektronik	Paket	1	1		1									1				
							Sub Kegiatan : Pengadaan Komputer, Peralatan Personal Komputer	Tersedianya Komputer, Personal Komputer, Peralatan Personal Komputer	Komputer, Personal Komputer, Peralatan Personal Komputer	Paket	1	1		1									1				
							Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor		Bulan	12	12	600.000.000	12	810.800.000	12	0	12	0	12	0	12	0				
							Sub Kegiatan : Listrik	Terbayarnya Listrik	Listrik	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : Inventaris Kantor/APK	Terpeliharanya Inventaris Kantor/APK	Barang Inventaris Kantor/APK	Bulan	12	12		12									12				
							Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran		Bulan	12	12	2.862.812.200	12	3.406.794.300	12		12		12		12	0				
							Sub Kegiatan : Operasional Kantor Tidak Tetap	Tersedianya Operasional Kantor Tidak tetap																			
							Sub Kegiatan : Barang Habis Pakai	Tersedianya Barang Habis Pakai	Barang Habis Pakai	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : Bahan Cetak	Tersedianya Bahan Cetak	Bahan Cetak	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : Makan dan Minum Kantor	tersedianya Makan dan Minum Kantor	Makan Minum	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : BBM	Tersedianya BBM	BBM Kegiatan	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : Operasional Jasa kantor/Sewa Gedung	Tersedianya Operasional Jasa kantor/Sewa Gedung	Operasional jasa kantor/sewa gedung	Bulan	12	12		12									12				
							Sub Kegiatan : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur	Tersedianya Honorarium Ahli/Instruktur	Honorarium Instruktur dan tenaga Ahli	Bulan	12	12		12									12				

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi	Ket.
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan : Pelaksanaan Hut Banten dan Banten Expo	Terlaksananya Hut Banten Expo	Hut Banten Expo	Paket	1	1			1								1			
							Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur	tersedianya aparatur yang berkompeten dan berwawasan		Orang	61	3	43.000.000	5	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	134	50.000.000			
							Sub Kegiatan : Fasilitas Administrasi Kepegawaian	tersedianya dokumen administrasi kepegawaian yang tertata dan teregister	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	61	59		19		15		15		15		123				
							Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Aparatur	tersedianya aparatur yang berkompeten	Jumlah Dokumen Kompetensi Aparatur	Dokumen		3		5		1		1		1		11				
							Kegiatan : Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Bulan	12	12	720.000.000	12	245.080.000								12			
							Sub Kegiatan : Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12		12									12			
							Sub Kegiatan : Koordinasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi Konsultasi ke Dalam Daerah	Bulan	12	12		12									12			
							Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		Bulan	12	12	22.500.000	12	30.000.000	12	45.100.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	300.000.000			
							Sub Kegiatan : Buku Koleksi	Tersedianya Buku Koleksi	Jumlah Buku Koleksi	Judul		75		30		0		0					105			
							Sub Kegiatan : Rak Buku	Tersedianya Rak Buku	Jumlah Rak Buku	Unit		2		1		0		0					3			
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Internal	terkelolanya Perpustakaan Internal secara efektif	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Internal	Bulan	12	12		12		12		12			12		12			
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Kearsipan Dinamis	terkelolanya kearsipan secara dinamis	Jumlah pelaksanaan pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD	Bulan						12		12			12		12			
							Kegiatan : Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang berkualitas		Bulan					4	5.082.670.000	4	5.833.090.000	4	5.833.090.000	12	5.833.090.000				
							Sub Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Kegiatan					1		1		1			3				
							Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor yang berkualitas	Jumlah Kegiatan sarana dan Prasarana Kantor	Kegiatan					1		1		1			3				
							Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang berkelanjutan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kegiatan					1		1		1			3				
							Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah tepat sasaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Kegiatan					1		1		1			3				
							Sasaran RPJMD : Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan Keterbukaan Informasi	Strategi RPJMD : Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan RENSTRA : Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan berbasis elektronik dan Keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88,08		89		89,55		90		90			Kepala Diskomin	Provinsi Banten

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.	
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Sasaran RENSTRA : Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Strategi RENSTRA : Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	Arah Kebijakan RENSTRA : Peningkatan Pelayanan Informasi dan keamanan informasi berbasis teknologi			Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	10	20			40		60		80		100		100		Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi	Provinsi Banten	
							Kegiatan : Penyebarnya Informasi Pembangunan	Terinfomasikannya ke publik proses dan hasil pembanguna					16.728.896.900		9.744.748.000									0	Kasi Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	- Terlaksananya bintek Kapasitas Aparatur PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Bintek PPID utama dan PPID Pembantu OPD	orang	50	200		200									450				
							Sub Kegiatan : Penyebarnya Informasi Pembangunan	- Terbitnya Tabloid Menara banten	Tabloid Menara Bnten	Materi	12	12		12										12			
							Sub Kegiatan : Pembangunan Informasi Pembangunan pada Media Luar Ruang	- tersebarluasnya informasi Pembangunan pada media Luar Ruang	informasi pembangunan pda media luar ruang	Materi	9	36		36										81			
							Kegiatan : Pembangunan Informasi Pembangunan pada Media Cetak	tersebarluasnya informasi Pembangunan pada media Cetak	informasi pembangunan pada media cetak	Materi	76	60		55										191			
							Sub Kegiatan : Pembangunan Informasi Pembangunan pada Media Televisi	tersebarluasnya informasi Pembangunan pada media Televisi	informasi pembangunan pada media televisi	Materi	13	46		46										105			
							Sub Kegiatan : Pembangunan Informasi Pembangunan Melalui Media Radio	tersebarluasnya informasi Pembangunan pada media Radio	informasi pembangunan pada media radio	Materi	6	46		46										98			
							Sub Kegiatan : Pembangunan Informasi Pembangunan pada Media Online	tersebarluasnya informasi Pembangunan pada media Online	informasi pembangunan pda media Online	Materi	18	30		40										88			
							Sub Kegiatan : Pembangunan Informasi Pembangunan pada Media Sosial	tersebarluasnya informasi Pembangunan pada media Sosial	informasi pembangunan pda media Sosial	Bulan	12	12		12										12			
							Sub Kegiatan : Pembangunan Informasi Pembangunan	terlaksananya materi informasi pembangunan	Dokumen materi informasi pembangunan	Paket	1	1		1										2			
							Sub Kegiatan : Pembangunan Materi Informasi Publik	terlaksananya materi informasi publik	Dokumen materi informasi publik	bulan	1	1		1										2			
							Sub Kegiatan : Konten Pemerintah Provinsi Banten (bantenprov.go.id)	terlaksananya konten website pemerintah provinsi banten	konten website banten prov	Bulan	12	12		12										12			
							Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang berkualitas		Dokumen						340	546.000.000	340	600.000.000	340	600.000.000	1020	600.000.000		Kasi Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Publik	tersedianya Daftar Informasi Publik dan seluruh OPD Berdasarkan Klasifikasi Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik dari seluruh OPD Berdasarkan Klasifikasi Informasi Publik	Dokumen						328		328		328			984				
							Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	terlayannya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Dokumen						12		12		12			36				
							Kegiatan : Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan		Bulan						12	7.808.000.000	12	8.620.540.000	12	8.600.540.000	12	8.600.540.000		Kasi Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi Banten	

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.			
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD							
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							Sub Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Peminan Daerah di Berbagai Media	- tersebar secara meratanya informasi Pimpinan di pemprov banten melalui berbagai media secara efektif dan akurat	Jumlah Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pimpinan Daerah di Berbagai Media	Bulan								12		12			12						
							Kegiatan : Komunikasi kelembagaan dan kemitraan media	Meningkatnya Peran Kelembagaan dan Kemitraan Media					2.150.839.500		3.400.000.000													Kasi kelembagaan dan Kemitraan Media	Provinsi Banten
							Sub Kegiatan : Operasional Komisi Informasi Provinsi Banten	terlaksananya Operasional KI Provinsi Banten	Operasional KI	Bulan	12	12		12									12						
							Sub Kegiatan : FGD Stakeholder Pembangunan dengan Media Massa	- FGD Stakeholder Pembangunan dengan Media Massa	Kegiatan FGD Stakeholder Pembangunan dengan Media Masa	Kegiatan		4		4										8					
							Sub Kegiatan : Kemitraan dengan awak media massa	- terlaksananya Kemitraan dengan awak media massa	kemitraan dengan Awak Media Masa	Kegiatan		2		2										4					
							Sub Kegiatan : Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Berbagai Media	terlaksananya Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Berbagai Media	Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Berbagai Media	Kegiatan		4		4										8					
							Sub Kegiatan : Kerjasama kemitraan dengan ormas, lembaga profesi dan lembaga media untuk literasi masyarakat	terlaksananya Kerjasama kemitraan dengan ormas, lembaga profesi dan lembaga media untuk literasi masyarakat	Kegiatan Kerjasama kemitraan dengan ormas, lembaga profesi dan lembaga media untuk literasi masyarakat	Kegiatan	1	1		1										3					
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Opini Publik	- terkelolanya Opini Publik	Opini Publik	Bulan	12	12			12									12					
							Kegiatan : Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan standar layanan Informasi Publik		Bulan							12	2.000.000.000	12	2.300.000.000	12	2.300.000.000	12	2.300.000.000	12	2.300.000.000		Kasi kelembagaan dan Kemitraan Media	
							Sub Kegiatan : Fasilitasi KI	Terselenggaranya dukungan administrasi dan keuangan Komisi Informasi Provinsi Banten yang akuntabel	Jumlah Pengelolaan Pelaksanaan Fasilitasi KI	bulan							12		12				12		12				
							Kegiatan : Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	Terkelolanya Aspirasi dan Opini Publik terhadap pemerintah yang positif		Bulan							12	608.000.000	12	1.000.000.000	12	102.000.000	12	102.000.000			Kasi kelembagaan dan Kemitraan Media	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Pengumpulan Data dan Monitoring Analisa Berita, Aspirasi dan Opini Publik	terkela dengan baik Pengumpulan data dan Monitoring Analisa Berita, Aspirasi dan Opini Public di pemprov banten	Jumlah Pengelolaan Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Monitoring Analisa Berita, Aspirasi dan Opini Public	Bulan							12		12			12		12					
							Sub Kegiatan : Pembentukan Opini dan komunikasi krisis	- tertatnya manajemen pembentukan opini publik dan komunikasi krisis lingkup pemprov banten	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Opini dan Komunikasi Krisis	Bulan							12		12				12		12				
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan akun Media Sosial Pemprov Banten	terkelolanya dengan baiknya Pengaduan Masyarakat dan akun Media Sosial Pemprov Banten yang efektif	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan akun Media Sosial Pemprov Banten	Bulan						12		12				12		12					
							Kegiatan : Kemitraan Komunikasi Publik	terjalinya Hubungan kemitraan yang baik di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga		Kegiatan							14	700.000.000	14	1.150.000.000	14	1.150.000.000	42	1.150.000.000			Kasi kelembagaan dan Kemitraan Media		

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.		
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							Sub Kegiatan : Hubungan kemitraan di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga	- terjalinnya Hubungan baik kemitraan lembaga komunikasi dengan pemerintah;	Jumlah Kegiatan Hubungan kemitraan di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga	Kegiatan							9		9		9		27					
							Sub Kegiatan : Pembangunan Sumberdaya Komunikasi Publik	- terbentuknya sumberdaya komunikasi publik yang berkompeten	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sumberdaya Komunikasi Publik	Kegiatan							5		5		5		15					
						Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	Program Tata Kelola Persandian	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi	%	10	20			40		100		100		100		100		40		Kepala Bidang Statistik, Persandian, Informasi dan Komunikasi Publik	
								Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi		%							100		100		100		100		100			
						Kegiatan : Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Terkelolanya Persandian dan Keamanan Informasi yang handal			Dokumen	19	40	539.460.000	40	1.017.192.000	7	852.000.000	7	600.000.000	7	600.000.000	96	600.000.000			Kasi Tatakelola Persandian	Provinsi Banten	
						Sub Kegiatan Operasional Persandian dan keamanan informasi dan Pemeliharaan Alat Sandi, Alat Keamanan Informasi dan Alat Sarana Informas	terlaksananya Operasional Persandian dan keamanan informasi dan Pemeliharaan Alat Sandi, Alat Keamanan Informasi dan Alat Sarana Informas	operasional Persandian dan Keamanan Informasi	Dokumen	12	12		12										12					
						Sub Kegiatan Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten	terlaksananya Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten	Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten	Dokumen	2	1		1										4					
						Sub Kegiatan Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi di Seluruh PD	Terkelolanya Pengamanan Sistem Informasi di Seluruh PD	Pengamanan Sistem Informasi di Seluruh PD	Dokumen	0	12		12											24				
						Sub Kegiatan Pelayanan Informasi, Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besars	Terlaksananya Pelayanan Informasi, Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besars	Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besar	Dokumen	3	1		1											5				
						Sub Kegiatan Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi pada Aplikasi	terkelolanya Pengamanan Sistem Informasi pada Aplikasi	Keamanan Sistem Informasi pada Aplikasi	Dokumen	0	12		12											24				
						Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keamanan Informasi instansi Pemerintahan oleh SDM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se- Provinsi Banten	terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keamanan Informasi instansi Pemerintahan oleh SDM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se- Provinsi Banten	Pembinaan Pengelolaan Keamanan Informasi instansi Pemerintahan oleh SDM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se- Provinsi Banten	Dokumen	1	1		1										3					

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RP/JMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RP/JMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.				
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Periode Renstra SKPD								
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							Sub Kegiatan : Sosialisasi tentang "IT Security Assessment" di lingkungan Organisasi Pemerintah Provinsi	terlaksananya Sosialisasi tentang "IT Security Assessment" di lingkungan Organisasi Pemerintah Provinsi		Dokumen	1	1			1								3							
							Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persandian dan Keamanan Informasi	terbentuknya SDM yang berkompeteren di bidang keamanan informasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persandian dan Keamanan Informasi	Dokumen						1		1			1			3						
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Persandian	Terkelolanya Persandian secara efektif	Jumlah Dokumen Pengelolaan Persandian	Dokumen							2		2		2			6						
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Keamanan Informasi	terkelolanya keamanan informasi pada aplikasi yang efektif	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keamanan Informasi	Dokumen							4		4		4			12						
		Sasaran RP/JMD : Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Strategi RP/JMD : Meningkatkan akurasi data dan statistik sektoral secara elektronik	Arah Kebijakan RP/JMD : Peningkatan Validasi data dan Statistik Sektoral	tersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral						0		0		100		100		100			100				Kepala Dinas			
		Sasaran RENSTRA : Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Strategi RENSTRA : Menyajikan layanan informasi yang akurat dan akuratabel melalui analisis data sektoral elektronik	Arah Kebijakan RENSTRA : Meningkatkan Keakuratan Data Sektoral			Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah		60	65		70									70				Kepala Bidang Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan	Provinsi Banten		
								Ketersediaan Database Sektoral		%	0	0		0		50		75		100			100							
							Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Terkelolanya Data Statistik Sektoral		%	100	100	366.591.000	100	804.400.000	100	100		100		100		100	0				Kasi Pelayanan Informasi Statistik	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Pengumpulan Data dan Informasi Kab/Kota	Terlumpuhnya Data dan Informasi Kab/Kota	Data dan Informasi Kab/Kota	Keg		4		4		4		4		4			20							
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data	Terkelolanya Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data	Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data	Bulan		12		12		12		12		12			12							
							Sub Kegiatan : Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral	Tersajinya Data dan Informasi Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Sektoral	Bulan		12		12		12		12		12			12							
							Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Statistik	Tersedanya Diseminasi Informasi Statistik	Diseminasi Informasi Statistik	Bulan		12		12										12						
							Sub Kegiatan : Pembangunan Metode Penyajian Data Statistik	terlaksananya Pengembangan Metode Penyajian Data Statistik	Pengembangan Metode Penyajian Data Statistik	Keg		2		2		2		2		2			8							
							Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Statistik Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Statistik Provinsi	Pelayanan Informasi Statistik Provinsi	Bulan		12		12		12		12		12		12		12						
							Sub Kegiatan : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	Tersedanya Visualisasi Perangkat Daerah	Visualisasi Perangkat Daerah	Bulan		0		1										1						
							Sub Kegiatan : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	Tersusunnya Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	Bulan		12		12		12		12		12		12		12						
							Sub Kegiatan : Pengelolaan PPIID Pembantu	Terkelolanya PPIID Pembantu	PPIID Pembantu	Bulan	12	12		12										12						
							Sub Kegiatan : Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen		1		1										2						

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.			
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Periode Renstra SKPD							
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							Sub Kegiatan : Penyusunan Profi Kinerja Program Perangkat Daerah	Tersusunnya Profi Kinerja Program Perangkat Daerah	Dokumen Profi Kinerja Program Perangkat Daerah	Dokumen		2			2							4							
							Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Sektoral yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan		Bulan						12	800.000.000	12	836.580.000	12	836.580.000	12	836.580.000			Kasi Pelayanan Informasi Statistik			
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data	terkelolanya data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data yang akurat	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data yang akurat	Bulan						12		12		12		12							
							Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral	terlayani dan tersajikannya Data dan Informasi Statistik Sektoral yang akurat	Jumlah Pengelolaan Pelayanan dan Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral yang Akurat	Bulan						12		12		12		12							
2.	Tujuan RPJMD : Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan wilayah dan perekonomian daerah	Sasaran Daerah : Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah			Tersedianya Infrastruktur Daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah				%	50	100		100		100		100		100		100				SEKRETARIS DAERAH	Provinsi Banten		
										%	50	60		70		80		85		90		90				Asisten Pembangunan Dan Perekonomian			
										%	0	2,6		3		3,6		3,9		4						Kepala Diskominfo			
										%	12,41	30,26		48,38								48,38				Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
										%	0	0		0		67,31		85,08		100		100				Kepala Bidang Aplikasi Informatika			
										%	0	0		0		67,31		85,08		100		100				Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan			
										Jumlah	0	0		9		12		13		17		17				Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan			
							Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana telematika	Tersedianya Sarana dan Prasarana Telematika					8.673.666.500		9.290.000.000												Kasi Sarana dan Prasarana telematika	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi	Tersedianya dan Terkelolanya Jaringan Interkoneksi	Internet Seluruh OPD	Mbps	550	1150		1150								2850							
							Sub Kegiatan : Sarana dan Prasarana penunjang Sistem Informasi Terpadu	Tersedianya Sarana dan Praarana Penunjang Sistem Informasi Terpadu	Sarana dan Prasarana TIK	Unit	20	10		10								40							
							Sub Kegiatan : Bangunan Banten Command Center - Meeting Room	Tersedianya Bangunan Banten Command Center - Meeting Room	Command Center	Unit	1	1		0								2							
							Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik	Terpeliharanya Jaringan Fiber Optik	Jaringan FO	Bulan	12	12		12								12							
							Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan Wireless	Terpeliharanya Jaringan Wireless	Jaringan Wireless	Bulan	12	12		12								12							
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Inventarisasi Peralatan TIK	Terkelolanya Inventarisasi Peralatan TIK	Inventarisasi Peralatan TIK	Bulan	12	12		12								12							
							Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan sesuai standar		Unit						154	9.583.590.000	103	9.250.000.000	103	9.250.000.000	360	9.250.000.000			Kasi Sarana dan Prasarana telematika	Provinsi Banten		

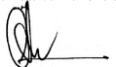
NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.	
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Periode Renstra SKPD					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							Sub Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi terpadu	tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpadu secara efektif	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpadu.bandwidth.	Unit						110		100		100		310					
							Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan TIK	Terpeliharanya Jaringan TIK yang efektif dan efisien	Jumlah Sarpras TIK yg terpeliharanya di Pemerintah Provinsi Banten efektif dan efisien (Unit)	Unit						3		3		3		15					
							Kegiatan : Pendayagunaan Telematika	Meningkatnya Pengelolaan Pendayagunaan SDM TIK		100	100	100	188.940.000	100	398.310.000							100			Kasi Pendayagunaan Telematika	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Sosialisasi Antisipasi Kejahatan Dunia Maya dan Internet Sehat di Provinsi Banten	Terlaksananya Sosialisasi Antisipasi Kejahatan Dunia Maya dan Internet Sehat di Provinsi Banten	Kegiatan Sosialisasi Antisipasi Kejahatan Dunia Maya dan Internet Sehat di Provinsi Banten	orang	800	800		1000								2600					
							Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Konten Website Terpadu	Terlaksananya Bimbingan Teknis Konten Website Terpadu	Kegiatan Bimtek Konten Website Terpadu	orang	100	100		100								300					
							Sub Kegiatan : Pembangunan Sinergitas dengan Relawan TIK	Terbangunnya Sinergitas dengan Relawan TIK	Kegiatan Sinergitas dengan Relawan TIK	Kegiatan	0	0		1								1					
							Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Legal Software	terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Legal Software	Pengawasan dan Pengendalian Legal Software	Kegiatan	0	1		1								2					
							Sub Kegiatan : Sosialisasi Regulasi Perundang-undangan di Bidang TIK	terlaksananya Sosialisasi Regulasi Perundang-undangan di Bidang TIK	Sosialisasi Regulasi Perundang-undangan di Bidang TIK	orang	100	100		100								300					
							Kegiatan : Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK	Terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan pendayagunaan pemanfaatan TIK sesuai dengan penundang undangan TIK		Dokumen						16	284.840.000	16	295.000.000	16	295.000.000	48	295.000.000		Kasi Pendayagunaan Telematika	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya TIK	Meningkatnya Pemahaman dan Kapasitas ASN dan Masyarakat terhadap Penundang-Undangan TIK	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya TIK	Kegiatan						14		14		14		42					
							Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Legal Software	Terawasinya dan Terkendalinya Legal Software di Pemerintah Provinsi Banten	Jumlah Kegiatan Pengawasan Legal Software di Pemerintah Prov Banten	Kegiatan						1		1		1		3					
							Sub Kegiatan : pembangunan sinergitas dengan relawan TIK	Terlaksananya pembangunan sinergitas dengan relawan TIK secara efektif	Jumlah Kegiatan pembangunan sinergitas dengan relawan TIK	Kegiatan						1		1		1		3					
							Kegiatan : Pengelolaan teknologi Informasi	Terkelolanya Teknologi Informasi		%	100	100	1.622.290.000	100	1.794.272.000							100	0		Kasi Pengelolaan Teknologi Informasi	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : SOP Suprastruktur, Egov,Infrastruktur Jaringan,Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi	Tersedianya SOP Suprastruktur, Egov,Infrastruktur Jaringan,Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi	Dokumen SOP	Dokumen	4	11		13								28					
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Center dan NOC	Terkelola Data Center dan NOC	Pengelolaan Data Center dan NOC	Bulan	12	12		12								12					
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Command Center	terkelola Command Center	Pengelolaan Command Center	Bulan	12	12		12								12					
							Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Wireles	terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Wireles	terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Wireles	Bulan	0	12		12								12					

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.		
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TI pada PD	terkelolanya Infrastruktur Jaringan TI pada PD	terkelolanya Infrastruktur Jaringan TI pada PD	Bulan	0	12			12								12					
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Infrastruktur Aplikasi Pelayanan Informasi Lintas Perangkat Daerah (service delivery chanel web, email, telephone/mobile phone, sms gateway)	terkelolanya Infrastruktur Aplikasi Pelayanan Informasi Lintas Perangkat Daerah (service delivery chanel web, email, telephone/mobile phone, sms gateway)	terkelolanya Infrastruktur Aplikasi Pelayanan Informasi Lintas Perangkat Daerah (service delivery chanel web, email, telephone/mobile phone, sms gateway)	Bulan	0	12			12									12				
							Sub Kegiatan : Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Penataan dan Evaluasi Suprastruktur Egov,Infrastruktur Jaringan, Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi	tersusunnya Kebutuhan Pengembangan Penataan dan Evaluasi Suprastruktur Egov,Infrastruktur Jaringan, Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi	tersusunnya Kebutuhan Pengembangan Penataan dan Evaluasi Suprastruktur Egov,Infrastruktur Jaringan, Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi	Dokumen	0	4			4								8					
							Sub Kegiatan : Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi	terlaksananya Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi	terlaksananya Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi	Bulan	0	12			12									12				
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Domain Banten Prov.go.id	terkelolanya Domain Banten Prov.go.id	terkelolanya Domain Banten Prov.go.id	Bulan	12	12			12									12				
							Kegiatan : Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	terkelolanya infrastruktur TIK yang yang berkualitas		Dokumen							16	1.500.000.000	9	1.750.000.000	6	1.750.000.000	31	1.750.000.000		Kasi Pengelolaan Teknologi informasi	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : Penyusunan Standar norma pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur TIK	tersusunnya Standar norma pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur TIK sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen Standar norma pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur TIK sesuai dengan aturan	Dokumen						11		4		1		16						
							Sub Kegiatan : Pengelolaan,pemanfaat an Infrastruktur TIK	terkelolanya infrastruktur TIK secara efektif dan efisien	Jumlah Dokumen pengelolaan infrastruktur TIK secara efektif dan efisien (Pengelolaan Data Center,Command Center, Rakor CCTV,Rakor layanan Pengaduan Masyarakat)	Dokumen						4		4		4			12					
							Sub Kegiatan : Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi yang berkualitas	Terselenggaranya Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi yang berkualitas	Dokumen Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi	Dokumen						1		1		1		3						
							Kegiatan : Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika	Terintegrasi dan Terbangunnya Aplikasi		%	100	100	1.673.668.100	100	2.650.000.000								100	0	Kasi Pengembang an Aplikasi Informatika	Provinsi Banten		
							Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi	Implementasi aplikasi	Orang	1120	300		300									1720					
							Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Informasi	Terlaksananya pembangunan sistem informasi	Pembangunan sistem informasi	Aplikasi	6	11		13										30				
							Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Informasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi	Pengembangan sistem informasi	Aplikasi	1	14		7										22				

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output/ F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.		
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Periode Renstra SKPD						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							Sub Kegiatan : - Integrasi Sistem Informasi	- Teraksananya integrasi sistem informasi	Integrasi sistem informasi	Dokumen	1	5		5									11					
							Sub Kegiatan : - Pengembangan Website OPD	- Teraksananya pengembangan website OPD	Pengembangan Website OPD	Bulan	12	12		12									12					
							Sub Kegiatan : - Pengelolaan Aplikasi Banten Satu Data	- Teraksananya aplikasi Banten satu data	Banten satu data	Bulan	0	12		12									12					
							Sub Kegiatan : - Sosialisasi Aplikasi	- Teraksananya sosialisasi aplikasi	sosialisasi aplikasi	Aplikasi	0	11		13									24					
							Sub Kegiatan : - Layanan Aduan Aplikasi	- Teraksananya layanan aduan aplikasi	layanan aduan aplikasi	Bulan	0	12		12									12					
							Sub Kegiatan : - Maintenance Website terpadu bantenprov.go.id	- Tersedianya layanan maintenance website terpadu bantenprov.go.id	maintenance website terpadu bantenprov.go.id	Bulan	12	12		12									12					
							Kegiatan : - Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Teraksananya Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan aturan		Dokumen							17	2.400.000.000	17	2.400.000.000	21	2.400.000.000	55	2.400.000.000		Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : - Layanan Aduan Aplikasi dan Layanan manajemen data Informasi elektronik Pemerintah Daerah	- Teraksananya Layanan Aduan Aplikasi secara efektif	Jumlah Dokumen Layanan Aduan Aplikasi dan Layanan manajemen data Informasi elektronik Pemerintah Daerah	Dokumen							12		12		12		12					
							Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	- Teraksananya Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pada Pemerintahan Provinsi Banten	Dokumen							1		1		1		3					
							Sub Kegiatan : - Penyusunan Standar norma dan kriteria penyelenggaraan SPBE	- Tersusunnya Standar norma dan kriteria penyelenggaraan SPBE sesuai dengan aturan	Jumlah Dokumen Standar norma dan kriteria penyelenggaraan SPBE Provinsi banten	Dokumen							4		4		8		16					
							Kegiatan : - Pembangunan, Integrasi dan Interoperabilitas	- Herbangannya dan terintegrasiya Aplikasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten secara efektif dan berdayaguna		Aplikasi							13	1.300.000.000	14	1.086.940.000	14	1.086.940.000	41	1.086.940.000		Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika	Provinsi Banten	
							Sub Kegiatan : - Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi	- Teraksananya Pembangunan Sistem Informasi/Aplikasi secara efektif dan berdayaguna	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan Aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi							8		8		8		24					
							Sub Kegiatan : - Integrasi layanan publik dan pemerintahan	- Teraksananya Integrasi layanan publik dan pemerintahan secara efektif dan berdayaguna	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi							5		6		6		17					
							Kegiatan : - Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	- teraksananya Layanan Pengadaan Barang Jasa Elektronik sesuai standar layanan		Dokumen	17	18	577.500.000	20	945.200.000	14	900.000.000	16	900.000.000	16	900.000.000	84	900.000.000		Kasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	Provinsi Banten		
							Sub Kegiatan : - Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur se-Provinsi Banten	- Teraksananya Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur se-Provinsi Banten	kegiatan Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur se-Provinsi Banten	Dokumen	2	2		2								6						
							Sub Kegiatan : - Rapat Koordinasi LPSE Se-Provinsi Banten	- Teraksananya Rapat Koordinasi LPSE Se-Provinsi Banten	Kegiatan Rakor LPSE	Dokumen	1	2		2									5					
							Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	- terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sesuai dengan standar layanan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Dokumen	12	12		12			12		12		12		12					
							Sub Kegiatan : - Bimtek SPSE bagi Penyedia Barang/Jasa	- Teraksananya Bimtek SPSE bagi Penyedia Barang/Jasa	Kegiatan Bimtek SPSE bagi Penyedia Barang/Jasa	Dokumen	2	2		4									8					

NO	Tujuan	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijaka n Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi	Ket.	
												2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya SPSE	meningkatkan SDM di bidang SPSE yang berkompeten	Jumlah Dokumen Bimtek SPSE bagi Penyedia Barang/Jasa dan Aparatur	Dokumen							2		4		4		10				

Sarang, Nopember 2019
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian Provinsi Banten



Komari, S.Pd, MM
NIP. 19650307 198902 1 005

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab																												
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II			Kepala Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian																												
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kominfo	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	<p>ASPEK PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN</th> <th>BOBOT</th> <th>SUB KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>35</td> <td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>20</td> <td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> <td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10</td> <td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencapaian Kinerja</td> <td>20</td> <td>Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya	TOTAL		100		
KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN																														
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																														
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																														
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																														
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi																														
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya																														
TOTAL		100																															
2	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih perlunya peningkatan keterbukaan informasi publik dari perangkat daerah di Provinsi Banten.</p> <p>Nilai Indikator Keterbukaan Informasi Publik + Nilai Presentasi</p> <p>Indikator Penilaian Keterbukaan Informasi Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator Pengembangan Website Indikator Pengumuman Informasi Pelayanan Informasi Penyediaan Informasi 																													

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
				<p>ASPEK PENILAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100; 2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9; 3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9; 4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan 5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9 	
3		Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan "Sistem Pengamanan Informasi terhadap jumlah Perangkat Daerah yang Ada	<p>Persentase Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi :</p> $\Sigma \frac{\text{perangkat daerah yang telah menggunakan Sistem Pengamanan Informasi}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100$	
4	Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Data Base Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik secara elektronik dan akurat	<p>Maturitas Data Base Statistik Sektoral :</p> $\Sigma \frac{\text{Data Sektoral Provinsi Banten yang Akurat}}{\text{Data Sektoral yang Ada}} \times 100$	
	Sasaran	Indikator Kinerja Program (esselon III)			
1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	$\frac{\Sigma \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}}{\Sigma \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}} \times 100$	Sekretaris Dinas

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		daerah			
2		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Capaian Dukungan Sarana Prasarana Prasarana Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	$\frac{\Sigma \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran}}{\Sigma \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia}} \times 100$ Sarana Administrasi Perkantoran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran 4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran 7. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran 	
3		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	$\frac{\Sigma \text{ Pegawai yang mendapat sertifikat kompetensi pada tahun } n}{\Sigma \text{ Jumlah Pegawai yang dilatih pada tahun } n} \times 100$	
4		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	$\frac{\Sigma \text{Laporan yang sesuai SAP}}{\Sigma \text{Laporan}} \times 100$	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Kegiatan (esselon IV)					
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel (Satuan Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Penyusunan Dok Laporan Keuangan, Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), Penyusunan Dok Laporan Pajak yang mendukung capaian indikator program	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Kasubag Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang efektif dan terarah, terukur dan tepat waktu (Satuab Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Penyusunan Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan, Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan, Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian, Penyusunan Renstra, Penyediaan Data dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Informasi Pembangunan yang mendukung capaian indikator program		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang kompeten (Satuan Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Dokumen Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur yang mendukung capaian indikator program	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan Bulan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pengelolaan Perpustakaan Internal dan Pengelolaan Kearsipan Dinamis selama 12 Bulan Tiap Tahun	Jumlah Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	
	Penyediaan Barang Jasa,Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas(Satuan Kegiatan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan Sarana	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Jasa,Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			dan Prasarana Kantor, Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		
	Sasaran	Indikator Kinerja Program (esselon III)			
5	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase capaian pengelolaan komunikasi dan informasi public yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik terhadap capaian pengelolaan komunikasi dan informasi.	$\Sigma \frac{\text{pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan}}{\text{capaian pengelolaan komunikasi dan informasi}} \times 100$	Kabid. Aplikasi dan Informasi, Komunikasi Publik
	Indikator Kinerja Kegiatan (esselon IV)				
	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang berkualitas (Satuan Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: pelaksanaan Penyediaan Informasi Publik, pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang mendukung capaian indikator program	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Publik	Kasi Informasidan Komunikasi Publik

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik yang transparan, efektif dan efisien,	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (satuan Bulan)	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik	
	Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan standar layanan Informasi Publik (satuan Bulan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: pelaksanaan fasilitasi KI	Jumlah Pelaksanaan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Kasi Kelembagaan dan Kemitraan Media
	Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	Terkelolanya Aspirasi dan Opini Publik terhadap pemerintah yang positif (satuan Bulan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: pelaksanaan Pengumpulan Data dan Monitoring Analisa Berita, Aspirasi dan Opini Public, pelaksanaan Pengembangan Opini dan komunikasi krisis, dan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan pengelolaan akun Media Sosial Pemprov Banten.	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Aspirasi dan opini Publik	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik	terjalannya Hubungan kemitraan yang baik di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga (Satuan Kegiatan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Hubungan kemitraan di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik	
	Sasaran	Indikator Kinerja Program (esselon III)			
6	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral	Ketersediaan Database Sektoral	data dan informasi Sektoral yang di publikasikan dan ketersediaan Database Sektoral	$\sum \frac{\text{Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan}}{\text{Data Statistik Sektoral yang Ada}} \times 100$	Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Layanan Pengadaan
	Indikator Kinerja Kegiatan (esselon IV)				
	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Sektoral yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan (Satuan Bulan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data dan Pelayanan dan Penyajian Data dan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Kasi Pelayanan Informasi Statistik

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Informasi Statistik Sektoral		
	Sasaran	Indikator Kinerja Program (esselon III)			
7	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Persentase Aplikasi di OPD yang telah memenuhi Standar Keamanan Informasi	$\sum \frac{\text{Aplikasi di OPD yang memenuhi Standar Keamanan}}{\text{Jumlah Aplikasi yang Ada}} \times 100$	Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan layanan pengadaan
		Indikator Kinerja Kegiatan (esselon IV)			
	Kegiatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Terkelolanya Persandian dan Keamanan Informasi yang handal (Satuan Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Operasional Persandian, Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan, Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi di Seluruh PD, Pelayanan Informasi dan Pengamanan Data di Hari Besar, Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi Pada	Jumlah Dokumen Pengelolaan Persandian dan Kemanan Informasi	Kasi Tata Kelola Persandian

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Aplikasi,Peningkatan Kapasitas SDM Persandian dan Keamanan Informasi,Sosialisasi tentang IT Security Assisment di Lingkup OPD,Pengelolaan Persandian,Pengelolaan Keamnnan Informasi,Pembinaan dan Pengelolaan Keamnanan Pemerintah oleh SDM Persandian Kab/Kota		

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur																				
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah																				
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah																				
Dinas Komuniakasi dan Informatika, Statistik dan Persandian																				
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab															
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis EsselonII			Kepala Dinas Komuniakasi dan Informatika, Statistik dan Persandian															
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	SPBE bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi dapat menggunakan pelayanan secara elektronik.</p> $\frac{\sum \text{indikator SPBE} \times \sum \text{level kematangan setiap indikator SPBE}}{\sum \text{indikator}}$ <p>ASPEK PENILAIAN NO NILAI INDEKS PREDIKAT</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </table>	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang	
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																		
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																		
3	2,6 – < 3,5	Baik																		
4	1,8 – < 2,6	Cukup																		
5	< 1,8	Kurang																		
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III)																		
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana TIK yang Memadai dan	Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian	$\sum \frac{\text{perangkat teknologi informasi yang mendukung Pencapaian SPBE}}{\text{ketersediaan perangkat TI yang ada}} \times 100$	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi															

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur					
Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah					
Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah					
Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Berkualitas		pelaksanaan SPBE di provinsi banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada		
	Indikator Kinerja Kegiatan (Esselon IV)				
	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan sesuai standar (Satuan Unit)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi terpadu dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan TIK	Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia dan Terpelihara	Kasi Sarana dan Prasarana Telematika
	Kegiatan Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK	Terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan pendayagunaan pemanfaatan TIK sesuai dengan perundang undangan TIK (Satuan Kegiatan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya TIK, Pengawasan dan Pengendalian Legal Software dan Pelaksanaan Pembentukan Relawan TIK	Jumlah Kegiatan Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK	Kasi Pendayagunaan Telematika

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	terkelolanya infrastruktur TIK yang yang berkualitas (Satuan Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Penyusunan Standar norma pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur TIK, Pengelolaan, pemanfaatan Infrastruktur TIK dan Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Infrastruktur TIK	Kasi Pengelolaan teknologi Informasi
	Sasaran	Indikator Kinerja Program (esselon III)			
2		Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks penilaian SPBE terhadap capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang tersedia	$\frac{\sum \text{Pengelolaan Sarpras Aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks SPBE}}{\text{Pengelolaan Aplikasi yang ada}} \times 100$	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Kegiatan (Esselon IV)					
	Kegiatan Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan aturan (Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Layanan Aduan Aplikasi dan Layanan manajemen data Informasi elektronik Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Pelaksanaan Penyusunan Standar norma dan kriteria penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika
	Kegiatan Pembangunan, Integrasi dan Interpropabilitas	Terlaksananya Pembangunan, Integrasi dan Interpropabilitas (Satuan Aplikasi)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikas dan Pelaksanaan Integrasi layanan publik dan pemerintahan	Jumlah Aplikasi yang di integrasi dan Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja Program (esselon III)			
3		Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan	Capaian Standar Layanan LPSE yang memenuhi Standar Layanan LPSE. Pada Tahun 2019 LPSE Prov Banten telah memenuhi 9 Standar Layanan yaitu : 1. Standar Layanan Kebijakan, 2. Standar Pengorganisasian Layanan, 3. Standar Pengelolaan Aset Layanan, 4. Standar Pengelolaan Risiko Layanan, 5. Standar Pengelolaan Perubahan, 6. Standar Pengelolaan Kapasitas, 7. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, 8. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan, 9. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: perlu upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan menerapkan Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan yang terdiri atas :</p> <p align="center">∑ Standar Layanan LPSE yang di capai</p> <p>17. Standar Layanan LPSE</p> <p>a. Standar Layanan Kebijakan</p> <p>b. Standar Pengorganisasian Layanan</p> <p>c. Standar Pengelolaan Aset Layanan</p> <p>d. Standar Pengelolaan Risiko Layanan</p> <p>e. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk</p> <p>f. Standar Pengelolaan Perubahan</p> <p>g. Standar Pengelolaan Kapasitas</p> <p>h. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>i. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat</p> <p>j. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan</p> <p>k. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan</p> <p>l. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan</p> <p>m. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan</p> <p>n. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan</p> <p>o. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan</p> <p>p. Standar Pengelolaan Kepatuhan</p> <p>q. Standar Penilaian Internal</p>	Kepala Bidang Persandian, Statistik dan Layanan Pengadaan

Misi 2: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Tujuan: Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Sasaran Daerah: Penyediaan Infrastruktur Daerah

Dinas Komuniikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Indikator Kinerja Kegiatan (Esselon IV)				
	Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Jasa Elektronik sesuai standar layanan (Satuan Dokumen)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya SPSE	Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan Barang & Jasa Elektronik	Kasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik